

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN**

#### **1. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Polda Kalimantan Selatan**

###### **a. Kondisi Umum**

Polda Kalimantan Selatan sebagai salah satu unsur Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap stabilitas kamtibmas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung dan menyukseskan lancarnya program pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian kedepan, Polda Kalimantan Selatan akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, Polda Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Polda Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian

---

<sup>1</sup>Rencana Kerja Polda Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013, h. 1.

<sup>2</sup>Rencana Kerja Polda Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013, h. 1.

Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>3</sup>

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai saat ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polda Kalimantan Selatan yang juga bagian dari instansi pemerintahan telah melaksanakan reformasi didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan undang-undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012,

---

<sup>3</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 1.

tanggal 30 Oktober 2012 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok Polda Kalsel**

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polda Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

##### **b. Fungsi Polda Kalsel**

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

h.2. <sup>4</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013,

h.2. <sup>5</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013,

- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan.
- 4) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
- 5) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

- 6) Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### **c. Visi dan Misi Polda Kalsel**

Visi Polda Kalsel:

“Terwujudnya pelayanan yang prima, penegakan hukum dan mewujudkan Kamtibmas yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisionil yang proaktif di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 3.

Misi Polda Kalsel:

- a. Meningkatkan peran Intelijen Kepolisian dalam melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan deteksi aksi terhadap gejala sosial yang berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel;
- c. Memantapkan Kamseltibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang;
- d. Meningkatkan keberhasilan penanggulangan gangguan Kamtibmas terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi);
- e. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat melalui pengembangan strategi Polmas dalam memelihara Kamtibmas yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Meningkatkan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan hak asasi manusia;

---

<sup>7</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h.. 6.

- g. Mengelola seluruh sumber daya Kepolisian guna mendukung kegiatan operasional kepolisian secara profesional, transparan, akuntabel dan modern;
- h. Membangun Sistem Sinergi Polisional Interdepartemen, Pemerintah Daerah dan Komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan (*partnership building/networking*) dan memelihara Kamtibmas.<sup>8</sup>

**d. Tujuan**

- a. Terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya sarana Pembangunan Nasional 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalsel;
- b. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
- c. Terbangunnya kerja sama dengan masyarakat dalam wadah Polmas dan dalam Sistem Sinergi Polisional Inter departemen (Sis Spindep);
- d. Tergelarnya operasional Polri baik pre-emptif maupun preventif pada satuan-satuan Kewilayahan; telah tergelar yaitu semakin ramping di tingkat atas, penguatan tingkat menengah pada Polda, serta makin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan di bawah pada tingkat Polres dan Polsek sebagai tolak ukuran remunerasi;

---

<sup>8</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 7.

- e. Tertanggulangnya trend perkembangan kejahatan dan meningkatnya penuntasan kasus kriminilitas terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi);
- f. Terwujudnya kerukunan sosial masyarakat sehingga terbebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi di wilayah hukum Polda Kalsel.<sup>9</sup>

#### **e. Sasaran Strategis Polda Kalsel**

- a. Sasaran Strategis Polda Kalsel
  - 1) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat;
  - 2) Tergelarnya personel Polri di seluruh Kesatuan Wilayah dengan memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat;
  - 3) Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif dan meningkatnya pelayanan prima Kepolisian secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel;
  - 4) Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan

---

<sup>9</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 8.



kejahatan yang berimplikasi kontinjensi) secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel serta terpenuhinya hak-hak tersangka dan korban;

- 5) Terlaksananya penerimaan anggota Polri secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis dengan mengikut sertakan pengawas eksternal;
- 6) Meningkatnya peran media massa dan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 7) Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.<sup>10</sup>

b. Penetapan Kinerja Polda Kalsel

Penetapan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/102/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang buku Pedoman Penetapan Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangan sumber daya yang dikelolanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 8.

<sup>11</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 9.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).<sup>12</sup>

## **2. Pendekatan Agama Dalam Peningkatan Kinerja Kepolisian Polda Kalimantan Selatan**

### **a. Latar belakang**

Masyarakat Banjar mayoritas menganut agama Islam, dan mereka termasuk orang-orang yang relatif taat melakukan agamanya, meskipun mungkin sulit membuktikannya. Hampir dapat dipastikan tidak ada orang Banjar yang dewasa atau menjelang dewasa yang dapat mengamalkan ajaran agamanya. Tetapi, ada sebagian orang yang tidak melakukannya pada waktu-waktu yang seharusnya, baik dengan alasan tertentu, ataupun tanpa alasan sama sekali.

Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai. Sistem nilai ini tentunya akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama.

Agama Islam yang berdasarkan Alquran dan hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam

---

<sup>12</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013, h. 9.

segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja.

Kebangkitan peran agama di lingkungan Polda Kalimantan Selatan mulai terjadi pada masa kepemimpinan Brigadir Jenderal Halba Rubis Nugroho pada tahun 2006. Yang mana pada saat kepemimpinan beliau sering diadakan kunjungan ke pesantren pesantren khususnya pesantren ushuluddin di Martapura, dikarenakan kedekatan beliau dengan pimpinan pondok pesantren tersebut, sehingga terjalin kerja sama yang cukup erat antara Polda Kalimantan Selatan dan pondok pesantren ushuluddin. Antara lain dalam penggemblengan mental keagamaan para calon anggota kepolisian yang baru menyelesaikan pendidikan SPN, selain itu juga pesantren kilat terhadap para anggota kepolisian yang bermasalah.<sup>13</sup>

Berbeda dengan masa kepemimpinan Brigadir Jenderal Halba Rubis yang lebih dekat dengan pesantren, pada masa kepemimpinan Brigadir Jenderal Anton Bahrul Alam sisi keagamaan yang sangat menonjol adalah shalat berjamaah dilingkungan Mapolda Kalimantan Selatan, pengajian Al-Qur'an di pagi hari serta pendekatan kepada masyarakat dengan kunjungan-kunjungan ke masjid dan mushalla yang ada di Kalimantan Selatan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang Anton Bahrul Alam yang sangat agamis dalam kehidupannya sehari-hari, selain itu beliau juga berkecimpung dalam salah satu organisasi keagamaan Jama'ah Tabligh, yang memang juga merupakan organisasi yang

---

<sup>13</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak supriadi Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel 12 November 2014

sering melakukan kunjungan-kunjungan ke masjid masjid untuk menyiarkan agama, namun hal itu juga dimanfaatkan oleh seorang Anton Bahrul Alam untuk mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan Kamtibmas.

Pada masa inilah suasana keagamaan sangat kental dilingkungan Polda Kalimantan Selatan. Selepas masa Brigadir Jenderal Anton Bahrul Alam, maka dilanjutkan oleh masa kepemimpinan Brigadir Jenderal Untung Rajab, pada masa kepemimpinan beliau yang sangat ditekan adalah pendekatan diri kepada Allah dan Al-Qur'an bagi anggota yang beragama Islam. Dengan tujuan agar para anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini kedekatan Untung Rajab dengan para ulama dan orang-orang di jama'ah tabligh cukup berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.<sup>14</sup>

Pada periode-periode selanjutnya memang diakui mulai terjadi penurunan dalam hal pendekatan terhadap agama. Hal ini tidak terlepas dari gaya yang dipakai oleh masing-masing pemimpin yang silih berganti di Polda Kalimantan Selatan. Namun hal-hal yang bersifat nilai ajaran dan kebiasaan yang mulai ditumbuhkan oleh para pemimpin terdahulu masih terus berlanjut hingga sekarang.

Maka latar belakang keagamaan dari pemimpin serta kedekatan mereka dengan para tokoh agama dapat dikatakan sangat mempengaruhi besar atau tidaknya peran agama yang ditinjalkan untuk peningkatan kinerja kepolisian khususnya di Polda Kalimantan Selatan..

---

<sup>14</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Supriadi Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel 12 November 2014

Menurut Brigadir Jenderal Polisi Drs. H. Anton Bachrul Alam. S.H., karena mayoritas orang Banjar beragama Islam, maka dirasa perlu dilaksanakan pendekatan agama tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjadikan polisi yang agamis, menjadi panutan bagi masyarakat dan menghasilkan pencitraan yang baik di tengah-tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Masyarakat Banjar juga merupakan sasaran kepolisian yang dari mereka kepolisian dapat memperoleh keterangan dan informasi. Pada dasarnya semua anggota Polri melaksanakan tugas Intelijen dan Bimastra. Bimastra itu di mana ia bertempat tinggal kurang lebih 100 m dari dia bertempat tinggal, dia harus menguasai wilayah tersebut. Dalam menguasai wilayah dan mendapat informasi, polisi harus pandai-pandai beradaptasi dengan masyarakat yang religius. Pendekatan agama berperan penting untuk mewujudkan hal tersebut, karena masyarakat akan lebih patuh dan taat kepada perintah polisi dan percaya akan informasi, saran-saran dan bimbingan, kalau polisinya taat beragama.<sup>16</sup>

Polri mempunyai pedoman hidup dan pedoman kerja, yaitu Tribrata dan Catur Prasetya. Isi Tribrata yang pertama yaitu berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal yang pertama dibangun adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau anggota polri telah dibekali dengan akidah, maka dia faham tujuan dan motivasi dalam bekerja yang bernilai ibadah. Apabila dalam mindset pikiran seseorang telah tertanam

---

<sup>15</sup> Brigadir Jenderal Polisi Drs. H. Anton Bachrul Alam. S.H, Ketua Polda Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2014.

<sup>16</sup> Ajun Komisararis Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

bahwa apa yang dikerjakan polisi itu bernilai ibadah, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela, seperti memeras orang lain, menyakiti hati orang lain, dan apabila ada orang yang memerlukan bantuan atau pertolongan, dia akan respek memberikan bantuan tersebut. Dengan demikian, agama itu sebenarnya mengajarkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.<sup>17</sup>

Pendekatan agama juga dilaksanakan untuk membangun pencitraan kepolisian di masyarakat. Dalam menciptakan citra kepolisian di masyarakat, salah satunya Polri dalam melaksanakan tugasnya harus dibekali ilmu agama. Dengan ilmu agama, dia tidak akan melenceng dari norma-norma yang sudah ada.<sup>18</sup>

Pendekatan agama merupakan sarana yang paling mudah untuk menyampaikan visi dan misi Polri kepada masyarakat, karena mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan beragama Islam. Kegiatan keagamaan merupakan fitrah yang sudah diperintahkan Allah, dan bukan tradisi. Aturan-aturan agama yang telah ditetapkan di dalam Alquran merupakan aturan yang terbaik untuk dilaksanakan.<sup>19</sup>

#### **b. Langkah-Langkah yang Dilakukan Untuk Peningkatan Kinerja Kepolisian**

---

<sup>17</sup> Ajun Komisariss Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

<sup>18</sup> Bapak Hamsan, Biro Humas Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

<sup>19</sup> Ajun Komisariss Besar Polisi Riduan Arif Waluyo, Kepala Perawatan 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Nopember 2014.

Polisi adalah salah satu aparaturnegara yang tugas utamanya menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi sebagai pengayom sekaligus pelayan masyarakat, akan terus meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai abdi negara sehingga tercipta sebuah kondisi negara yang stabil dan dinamis.

Untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan suatu pendekatan, salah satunya adalah pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan dilakukan dalam hal peningkatan kinerja kepolisian, baik untuk polisi itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya maupun terhadap partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas Polisi.

a. Langkah yang dilakukan dalam meningkatkan moral personel Polda Kassel melalui kematangan emosional dan kemantapan spiritual dengan beberapa kegiatan:

- 1) Membaca Alquran setiap pagi selama 10 menit untuk semua anggota Polda. Alquran ini dibeli langsung oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Drs. H. Anton Bachrul Alam. S.H.<sup>20</sup>
- 2) Kegiatan pesantren kilat, yang mana dikhususkan kepada para anggota kepolisian yang bermasalah untuk dibina secara spiritual dan mental di pesantren Ushuluddin Martapura pada masa Brigadir Jendrak Polisi Drs. Halba Rubis Nugroho, M.M.<sup>21</sup>
- 3) Menggunakan metode Jamaah Tabligh

---

<sup>20</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Riduan Arif Waluyo, Kepala Perawatan 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Nopember 2014.

<sup>21</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kassel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014

Metode ini digunakan dengan cara mendakwahkan agama Allah, mentauhidkan Allah dan memuliakan Nabi-Nya, menciptakan suasana keagamaan dengan beri'tikaf di masjid, shalat lima waktu dikerjakan di awal waktu dan melaksanakan ta'lim yang bertujuan agar menjadi Muslim yang benar sesuai sunah yang diperintahkan Rasuullah. Kemudian setelah 3 hari keluar (*khuruj* dalam istilah Jamaah tabligh), diharapkan bisa mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari kepada keluarga yang juga dinamaka ta'lim rumah.<sup>22</sup>

- 4) Kegiatan ceramah bagi yang beragama Islam. Dilaksanakan setiap Rabu pagi bertempat di mesjid. Di dalam pelaksanaan kegiatan, diberikan materi tentang keagamaan, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, fikih dan akhlak. Pendalaman agama ini perlu diberikan untuk meningkatkan iman seseorang dan memperbaiki akhlak, dan juga bertujuan untuk membentuk polisi yang memiliki jiwa penolong terhadap masyarakat. Dengan demikian, dia punakanikhlas dalam bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>
- 5) Kegiatan Binroh juga diberikan kepada anggota Polda Kalimantan Selatan non islam seperti bagi umat Kristen. Jumlah umat Kristen yang diberikan pendidikan agama sekitar 25 sampai 30 orang.

---

<sup>22</sup> Ajun Komisariss Besar Polisi Riduan Arif Waluyo, Kepala Perawatan 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Nopember 2014.

<sup>23</sup> Ajun Komisariss Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.



Kegiatan ini dilaksanakan di perpustakaan atau ruang rapatnya Dirlanta setiap Rabu pagi. Materi yang diberikan juga masalah keagamaan yang berkaitan untuk perbaikan akhlak. Materi langsung disampaikan oleh Pendeta.<sup>24</sup>

**JADWAL PENCERAMAH BINROH KRISTEN BAGI PERSONEL POLRI /  
PNS POLDA KALSEL TAHUN 2014**

NO	TGL / BULAN	NAMA PENCERAMAH
1.	08 Januari 2014	Drs. Edy Kaolana
2.	15 Januari 2014	Bertin Barutu
3.	22 Januari 2014	Irmina Indaryanti
4.	29 Januari 2014	Sulastri
1.	05 Februari 2014	Drs. Edy Kaolana
2.	12 Februari 2014	Bertin Barutu
3.	19 Februari 2014	Irmina Indaryanti
4.	26 Februari 2014	Sulastri
1.	05 Maret 2014	Drs. Edy Kaolana
2.	12 Maret 2014	Bertin Barutu
3.	19 Maret 2014	Irmina Indaryanti
4.	26 Maret 2014	Sulastri
1.	02 April 2014	Drs. Edy Kaolana
2.	09 April 2014	Bertin Barutu
3.	16 April 2014	Irmina Indaryanti
4.	23 April 2014	Sulastri
5.	30 April 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	07 Mei 2014	Bertin Barutu
2.	14 Mei 2014	Irmina Indaryanti
3.	21 Mei 2014	Sulastri
4.	28 Mei 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	04 Juni 2014	Bertin Barutu

<sup>24</sup> Ajun Komisararis Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

2.	11 Juni 2014	Irmina Indaryanti
3.	18 Juni 2014	Sulastri
4.	25 Juni 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	02 Juli 2014	Bertin Barutu
2.	09 Juli 2014	Irmina Indaryanti
3.	16 Juli 2014	Sulastri
4.	23 Juli 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	06 Agustus 2014	Bertin Barutu
2.	13 Agustus 2014	Irmina Indaryanti
3.	20 Agustus 2014	Sulastri
4.	27 Agustus 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	03 September 2014	Bertin Barutu
2.	10 September 2014	Irmina Indaryanti
3.	17 September 2014	Sulastri
4.	24 September 2014	Drs. Edy Kaolana
1.	01 Oktober 2014	Bertin Barutu
2.	08 Oktober 2014	Irmina Indaryanti
3.	15 Oktober 2014	Sulastri
4.	22 Oktober 2014	Drs. Edy Kaolana
5.	29 Oktober 2014	Bertin Barutu
1.	05 Nopember 2014	Irmina Indaryanti
2.	12 Nopember 2014	Sulastri
3.	19 Nopember 2014	Drs. Edy Kaolana
4.	26 Nopember 2014	Bertin Barutu
1.	03 Desember 2014	Irmina Indaryanti
2.	10 Desember 2014	Sulastri
3.	17 Desember 2014	Drs. Edy Kaolana
4.	24 Desember 2014	Bertin Barutu
5.	31 Desember 2014	Irmina Indaryanti

Sumber Data: Perawatan Personel Polda Kalimantan Selatan, Tahun 2013.

- b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pendekatan kepada masyarakat:

- 1) Melaksanakan semaan Alquran secara terprogram di seluruh Satker/Satwil jajaran Polda Kalsel.<sup>25</sup>
- 2) Zikir Ghoffilin bagi anggota Mapolda Kalsel dan jajaran kewilayahan.<sup>26</sup>
- 3) Zikir akbar dan ceramah agama, dilaksanakan menjelang pemilihan umum (PEMILU) tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk mengundang masyarakat agar melaksanakan Pemilu damai.<sup>27</sup>
- 4) Shalat berjamaah bersama masyarakat di Mesjid Sabilal Muhtadin. Ini bertujuan agar polisi dapat berbaur dengan masyarakat dan dalam membangun pencitraan di masyarakat.<sup>28</sup>
- 5) Shalat berjamaah dengan berpindah-pindah masjid dan langgar, Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat. Khususnya pada masa jabatan Brigadir Jenderal Polisi Drs. H. Anton Bachrul Alam. S.H.<sup>29</sup>
- 6) Melakukan Patroli Subuh dan Shalat Subuh berjamaah bersama masyarakat, dilanjutkan kultural yang didalamnya disampaikan tentang Kamtibmas.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2009, h. 53.

<sup>26</sup>Memori Serah Terima Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Kalsel tanggal 1 Desember 2012, h. 34.

<sup>27</sup> Bapak Hamsan, Biro Humas Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

<sup>28</sup> Bapak Hamsan, Biro Humas Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

<sup>29</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Riduan Arif Waluyo, Kepala Perawatan 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Nopember 2014.

<sup>30</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

- 7) Menunjukkan perilaku dan tindakan-tindakan yang baik terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin ke masjid, tentunya dengan perilaku tersebut polisi lebih didengar daripada polisi yang tidak pernah ke masjid. Setiap ada kegiatan keagamaan yang ada di wilayahnya, ia berani tampil untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia mampu menjadi imam, azan, dan kalau ada orang meninggal dia bisa mengafani dan mensholatkan.<sup>31</sup>

Pendekatan agama juga diberikan kepada anggota yang memiliki keterlibatan masalah narkoba. Keterkaitan dengan masalah narkoba ini, menyangkut dengan masalah akidah dan mental yang bersangkutan, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu ialah hatinya. Untuk mengembalikan personel yang terlibat dengan masalah narkoba ke jalan yang lurus, maka kegiatan rehab dilaksanakan 2 (dua) kali di Polda, setelah berhasil, terus dilaporkan ke Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merespon dan memberikan anggaran untuk merehabilitasi anggota. Di BNN anggota yang bermasalah tidak hanya diberikan akidah, akan tetapi ditambah dengan materi lain yang bertujuan untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Sementara BNN membantu secara medis dan menggunakan terapi-terapi tertentu.<sup>32</sup>

Polda Kalimantan Selatan juga memperingati hari-hari besar Islam, seperti memperingati Nuzulul Qur'an, Shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Peringatan Nuzulul

---

<sup>31</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

<sup>32</sup> Ajun Komisaris Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

Qur'an dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012 bertempat di masjid Al-Muhtadin. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan sifat kejujuran, kepedulian dan solidaritas guna mewujudkan polri yang professional, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha bertempat di halaman Polda Kalimantan Selatan. Pada saat perayaan Idul Adha diselenggarakan juga penyembelihan hewan qurban yang dibantu oleh masyarakat setempat. Penyembelihan hewan qurban bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara polisi dan masyarakat.

### **c. Hasil yang diperoleh Polda Kalimantan Selatan**

Hasil yang diharapkan Polda Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pendekatan agama, yaitu:

- a. Hasil yang diharapkan bagi anggota personel dalam meningkatkan kinerja kepolisian:

- 1) Membawa ketaatan kepada agama, Allah dan Rasul

Apabila seseorang taat kepada agama dan menjalankan perintahnya serta patuh terhadap aturan kepolisian juga memulai bekerja dengan melaksanakan tugas dengan ikhlas, maka hal tersebut akan mengurangi tindakan pelanggaran dan meningkatkan kinerja yang lebih baik, karena dia menyadari ketika masuk jam kerja, dia selalu merasa diawasi Allah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Brigadir Jenderal Polisi Drs. H. Anton Bachrul Alam. S.H, Ketua Polda Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2014.

2) Meningkatnya kematangan emosional dan kemandirian spiritual

Polda Kalimantan Selatan

Adanya kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, shalat berjamaah, ceramah agama, semaan Alquran, I'tikaf di masjid dan pelaksanaan zikir, maka akan meningkatkan moral personel, kemandirian emosional dan kematangan spiritual dalam diri personel kepolisian akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Karena demikian, seseorang yang bekerja dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan, maka akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

3) Memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan ibadah

Bagi anggota Polri yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama, ketika masuk waktu shalat, mereka langsung mengerjakan shalat secara berjamaah di masjid tanpa diperintah ataupun diajak oleh atasan. Diharapkan tidak ada personel dengan alasan sibuk, yang menunggu teguran dan ajakan dari atasan untuk melaksanakan ibadah.<sup>34</sup>

4) Memiliki jiwa penolong

Bekerja adalah pekerjaan mulia, dan kemuliaan datang dari pelayanan. Melayani dengan penuh keikhlasan dan memiliki jiwa

---

<sup>34</sup> Ajun Komisariss Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

penolong yang tinggi terhadap masyarakat. Orang yang bekerja untuk diri sendiri memang hal yang normal, Tetapi melalui pekerjaannya mengabdikan pada sesuatu yang lebih besar untuk orang lain adalah pekerjaan mulia. Derajat pelayanan kita bertambah mulia bila dengan tulus, rendah hati, ramah dan hormat.<sup>35</sup>

5) Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas kerja

Pendekatan agama melalui perilaku dan budi pekerti yang baik dapat menumbuhkan kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dengan demikian, hal ini dapat meminimalisir perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku bagi anggota POLRI.

6) Bekerja penuh tanggung jawab

Bekerja merupakan amanah, dari amanah ini lahir tanggung jawab, sehingga kepercayaan adalah menjadi modal sosial tertinggi. Saat melakukan tugas kepolisian, dia merasa diawasi, maka hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.

b. Hasil yang diharapkan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat:

---

<sup>35</sup> Ajun Komisar Besar Polisi Toetoes, Kepala Bagian Perawatan Personel Polda Kalsel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Nopember 2014.

1) Pencitraan yang baik dimasyarakat

Polisi adalah salah satu oknum penegak hukum yang selalu mendapat perhatian publik, polisi juga bersumber dari warga masyarakat dan selalu berada ditengah masyarakat. Apabila seorang polisi bersandar pada agama yang dianutnya dan menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan agamanya dan meninggalkan yang dilarang, maka dia akan menjadi pelindung di tengah masyarakat. Hal demikian akan menghasilkan citra polisi yang baik di tengah masyarakat.

2) Respon positif dari masyarakat

Polisi yang memiliki perilaku taat beragama dan berkepribadian baik dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat akan merasa senang dan aman. Keakraban pun terjalin antara polisi dan masyarakat, hal ini juga terjadi dengan masyarakat yang kurang religious, dikarenakan ada kesan yang baik dari personel polisi tersebut, sehingga menimbulkan respon yang positif di masyarakat. Adanya respon positif dari masyarakat terhadap Polri, maka Polri akan mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan dan membina jaringan informasi dengan mudah serta melakukan penggalangan terhadap kelompok masyarakat maupun perorangan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mempunyai daya tangkal terhadap setiap bentuk kejahatan.



3) Memudahkan komunikasi antara masyarakat dan polisi

Kemitraan polisi dengan masyarakat akan dapat terjadi manakala polisi mampu bekerjasama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban, serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat turut serta diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama.

Adapun indikator kinerja penilaian hasil yang dicapai dapat digambarkan dengan pencapaian hasil antara lain :

- 1) Jumlah kasus yang terjadi.
- 2) Jumlah kasus yang dapat diselesaikan.
- 3) Jumlah pelanggaran disiplin anggota kepolisian.

Berikut hasil kinerja Polri periode tahun 2008 sampai dengan 2013 dalam hal penekanan jumlah kasus yang terjadi serta jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

**TAHUN 2008**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat	Realisasi	Presentase Pencapaian	Ket
----	---------	-------------------	--------	-----------------	-----------	-----------------------	-----

				<b>Capaian (Target)</b>		<b>Rencana tingkat capaian</b>	
1	<b>Lidik dan Sidik</b> Meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.  Meningkatkan kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menengakkan sepremasi hukum.	Dapatkan keje lasannya pidana atau bukan.  Terlaksana dan tuntasnya penyidikan (P21) kasus/ perkara : - Konvensional - Korupsi - Illegal logging - Illegal mining - Narkoba - Fishing - BBM - Tipiring	Laporan    Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus	8144    6.694 7 206 47 698 19 128 649	8144    4.698 7 206 42 698 19 128 649	100 %    75 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2008.

### TAHUN 2009

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase terjadinya 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas Polda Kalsel TA 2009 yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara dengan jumlah kasus sebanyak 7.571 kasus. Khusus untuk kejahatan yang berimplikasi kontijensi T.A 2009 adalah nihil.	Kasus	7.215	7.571	105 %
2	Persentase penyelesaian (Crime Clearance) 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan	%	4.909 (68 %)	5.062 (66,8 %)	104 %

	kejahatan yang berimplikasi kontinjensi T.A 2009.				
--	---	--	--	--	--

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2009.

### TAHUN 2010

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase terjadinya 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas Polda Kalsel TA 2010 yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara dengan jumlah kasus sebanyak 6.649 kasus.	Kasus	7.215	6.649	92 %
2	Persentase penyelesaian (Crime Clearance) 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi T.A 2010.	%	5.062	5.365	106%

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2010.

### TAHUN 2011

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase terjadinya 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas Polda Kalsel TA 2011 yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara dengan jumlah kasus sebanyak 7.197 kasus.	Kasus	6.649	7.197	108,2 %
2	Persentase penyelesaian (Crime Clearance) 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi sasaran prioritas : kejahatan	%	4.289	4.656	108,5 %

	konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi T.A 2011.				
--	---	--	--	--	--

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2011.

### TAHUN 2012

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	Jumlah penanganan tindak pidana.	Kasus	4.696	5.212	111%

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2012.

### TAHUN 2013

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi) secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel serta terpenuhinya hak-hak tersangka dan korban;	a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kejahatan konvensional.	65 %	63,7 %	98 %
	b. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kejahatan transnasional.	10 %	88,3 %	883 %
	c. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan Negara.	50 %	84,2 %	169 %
	d. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.	20 %	NIHIL	NIHIL

Sumber Data: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Kalsel Tahun 2013.

Sedangkan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan berjumlah :

TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
2008	332
2009	319
2010	270
2011	233
2012	64
2013	58

Sumber Data: Surat Keterangan Jumlah Pelanggaran Disiplin Personel Polda Kalsel.

### **B. Pembahasan Data Penelitian**

Agama memiliki peran yang penting dalam etos kerja seseorang. Hal ini dapat dilihat dari kematangan emosional dan kemantapan spiritual yang memberikan dorongan batin, akhlak dan moral seseorang, memberikan semangat bekerja untuk menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, agama berperan sebagai *motivator*, *Creator* dan *innovator* dalam kehidupan manusia.<sup>36</sup>

Agama berfungsi sebagai transformatif dalam kehidupan manusia, hal ini tercermin dari perubahan perilaku personel kepolisian itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Langkah-langkah yang disebutkan di atas, baik untuk meningkatkan kinerja personel kepolisian itu sendiri maupun untuk menumbuhkan citra kepolisian dimasyarakat telah dilaksanakan dengan maksimal. Semua kegiatan keagamaan tersebut bertujuan untuk perbaikan akhlak personel maupun masyarakat.

---

<sup>36</sup> Zulfu Mubaraq, *Sosiologi Agama*. (Malang : UIN Maliki Press. 2010 ), h.53-54.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan akhlak yang baik dalam menyikapi segala sesuatunya. Akhlak merupakan perangai setiap insan, secara istilah adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan dari orang tersebut, manusia dapat dikatakan baik oleh orang lain jika akhlak yang dimilikinya baik, begitu juga sebaliknya. Penilaian yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tanpa melihat sisi yang lainnya, karena penilaian tersebut bersifat subyektifitas, memang tidak dapat dinilai seseorang dari segi luarnya saja, akan tetapi ada ungkapan bahwa penilaian fisik merupakan cerminan dari dalam dirinya.

Menurut Max Weber, ajaran atau dogma suatu agama dapat sangat mempengaruhi cara kehidupan seseorang.<sup>37</sup> Pendekatan agama yang dilaksanakan di Polda Kalsel berdampak pada kehidupan personel. Dalam kehidupan sehari-hari maupun bekerja melaksanakan tugas, dia akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama, mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak melanggar aturan yang telah ditentukan agama. Di dalam jiwanya tertanam akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Berbeda dengan dogma ajaran protestan calvinis, agama mempengaruhi perilaku dan cara kerja penganutnya menjadi seorang kapitalis, yang bersandarkan pada cita ketekunan, hemat, berperhitungan, rational, dan sanggup menahan diri,

---

<sup>37</sup> Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja Dan Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), cet. ke-3, h. 9.

menemukan pasangannya. Sukses hidup yang dihasilkan oleh kerja keras bisa pula dianggap sebagai pembenaran bahwa ia adalah orang yang terpilih.<sup>38</sup>

Hasil yang diperoleh bagi personel kepolisian mempengaruhi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Polisi bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, berperilaku santun dengan prinsip polisi yang merangkul bukan memukul, polisi yang mengajak bukan membentak, polisi yang mendidik bukan menghardik dan juga memiliki jiwa penolong serta melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan, agar menjadi polisi yang terbaik di hadapan Tuhan dan masyarakat.

Sesuai dengan data yang telah disajikan, dimana dalam presentasi jumlah kasus yang terjadi, memang terdapat kenaikan maupun penurunan kasus, hal ini disebabkan juga oleh realitas masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Sehingga sangat sulit untuk selalu menekan angka presentase kejahatan yang terjadi. Akan tetapi dalam hal presentase kejahatan yang terselesaikan, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun jumlahnya, yang menggambarkan peningkatan tingkat efesiansi kerja personel kepolisian di Kalimantan Selatan.

Hal itu pula yang terjadi dalam jumlah pelanggaran disiplin personel kepolisian Polda Kalimantan Selatan. Yang mana terjadi penurunan disiplin yang cukup signifikan selama 6 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan juga tingkat efesiansi kinerja kepolisian serta kesadaran anggota kepolisian terhadap hal yang

---

<sup>38</sup> Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja Dan Perkembangan Ekonomi*, h. 9.

benar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota kepolisian yang baik.

Untuk mewujudkan Polri yang bermoral masih harus terus dilakukan pembenahan pada aspek kultural dengan terus melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penegakkan disiplin dan kode etik Polri serta memberikan *Reward and Punishment*, dan pendekatan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja kepolisian.

Ajaran agama dapat mempengaruhi hasil pencapaian seseorang dalam usaha (*achievement*). Pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan terhadap masyarakat menghasilkan apa yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Polri. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa polisi mampu menjadi panutan, pelindung dan mitra bagi masyarakat.

Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat bisa juga dilakukan melalui interaksi sosial maupun komunikasi sosial sehingga alur yang dibangun dalam rangka partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban berjalan sesuai dengan harapan dan masyarakat akan merasa dekat dengan polisi. Untuk dapat mengoptimalkan peran kepolisian dalam masyarakat, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pihak Polri melainkan masyarakat juga ikut berperan setidaknya untuk menyadari peran Polri yang diinginkan masyarakat.

Nilai-nilai keagamaan yang telah tertanam di dalam jiwa personel untuk meningkatkan kinerja di masyarakat yaitu bekerja dengan niat ikhlas, jujur,



amanah, tanggungjawab, dan adil.<sup>39</sup> Bekerja baginya merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bekerja bukan saja sebagai kewajiban, akan tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah.

Suatu pekerjaan yang didasari dengan niat untuk ibadah kepada Allah akan membentengi pelakunya dari melakukan hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaannya. Bekerja secara ikhlas karena dilandasi niat ibadah akan menuntun seseorang untuk giat dan sungguh-sungguh melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Semakin banyak tugas yang dapat terselesaikan dengan baik akan memperbesar peluang untuk mendapatkan penghargaan yang lebih wajar.

Firman Allah dalam Q.S. al-Qashash/ 28 : 77.

سَنَ كَمَا وَ أَحْسَنَ الدُّنْيَا مِن نَّصِيبِكَ تَنَسَّ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُاءِ اتَّكَ فِيمَا وَابْتَغِ  
المفسدين محب لا الله إن الأرض في الفساد تبغ ولا إليك الله أح

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemerolehan harta ialah untuk mencari pahala di sisi Allah dan ridha Allah dalam berbagai nikmat dan kebaikan yang telah diberikan. Meskipun beramal untuk akhirat, namun jangan meninggalkan kenikmatan yang halal sesaat di dunia. Mencari kejayaan akhirat itu diperintahkan Allah, tetapi bekerja mencari dunia juga diperintahkan.

---

<sup>39</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet. ke-2, h. 12.

Secara umum program-program utama Polda Kalimantan Selatan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun dalam rangka membangun kemitraan masyarakat (*Partnership Building*) melalui penyelenggaraan pelayanan masyarakat sampai komunitas-komunitas kecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri telah dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagai berikut: timbulnya rasa aman di masyarakat secara umum terpelihara, kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemerintah dapat diamankan dan dalam pelaksanaannya berjalan lancar, serta beberapa kasus-kasus besar yang memberikan dampak keresahan terhadap masyarakat secara luas dapat ditangani secara tuntas, kegiatan unjuk rasa dalam rangka penyampaian pendapat dimuka umum dapat dikendalikan sehingga berjalan dengan tertib dan lancar.